

Jokowi Minta Langkah Tanggap Darurat terkait Erupsi Semeru Segera Dilakukan

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk segera melakukan langkah tanggap darurat terkait erupsi Gunung Semeru. Langkah tanggap darurat itu utamanya untuk mencari korban hingga melakukan penanganan dampak bencana.

“Sesaat setelah mendapatkan laporan tentang bencana tersebut, saya memerintahkan kepada Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri PUPR, dan juga kepada Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, dan Bupati untuk segera melakukan tindakan secepat mungkin, langkah tanggap darurat, mencari dan menemukan korban, memberikan perawatan kepada yang luka-luka, dan melakukan penanganan dampak bencana,” kata Jokowi melalui akun Instagramnya, Minggu (5/12).

Jokowi juga memerintahkan agar bantuan pelay-

anan kesehatan dan logistik bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru dapat diselesaikan dengan segera. Dia juga meminta perbaikan infrastruktur dituntaskan secepatnya.

“Bantuan pelayanan kesehatan, penyediaan logistik kebutuhan dasar pengungsi, serta perbaikan infrastruktur harus dapat diselesaikan dalam waktu singkat,” ujarnya.

Jokowi juga mengimbau masyarakat untuk selalu mengikuti arahan petugas di lapangan dan meningkatkan kewaspadaan. Mengingat, Indonesia berada di wilayah rawan bencana atau ring of fire.

Jokowi pun mewantiwanti pemerintah daerah untuk tak lelah mengajak warganya selalu siaga dan waspada. Selain itu, dia juga meminta pemerintah daerah untuk mengantisipasi datangnya bencana di wilayahnya.

● han

AHY Instruksikan Kader Demokrat Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menginstruksikan kader partainya untuk segera turun membantu warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur yang terjadi pada Sabtu (4/12) sore.

“Saya menginstruksikan kepada kader Partai Demokrat di Lumajang dan Provinsi Jawa Timur untuk bisa segera turun membantu warga yang terdampak erupsi,” kata AHY dalam keterangannya, Minggu (5/12).

La pun mengajak seluruh pihak untuk berdoa bagi keselamatan warga sekitar Gunung Semeru. Selain itu, dia juga berharap seluruh proses evakuasi masyarakat di sekitar Gunung Semeru dapat berjalan lancar.

“Mari bersama kita berdoa untuk warga di wilayah Kabupaten Lumajang dan sekitarnya yang terdampak erupsi Gunung Semeru,” ucap AHY.

Merespons instruksi AHY, Kepala Badan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (BPPM) DPP

Partai Demokrat, Ali Mohammad Johan Suharli, langsung mengirimkan sejumlah uang untuk membeli kebutuhan pokok para pengungsi Semeru di tempat pengungsian sementara. Kemudian, DPD Partai Demokrat Jawa Timur juga bergerak cepat turut menyumbangkan tenaga dan sumber daya untuk meredakan beban korban bencana.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur, Reno Zulkarnaen yang juga tengah mengemban tugas sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua DPC Demokrat Lumajang.

“Sesuai instruksi Ketum AHY, dalam situasi seperti ini, warga membutuhkan gerak cepat seluruh elemen. Kita terus bergerak sembari mendoakan agar korban tidak bertambah,” ujar Reno.

Menurutnya, kebutuhan yang teridentifikasi sejauh ini selain makanan siap saji dan obat-obatan yaitu selimut, masker, popok bayi atau pampers, peralatan mandi, hingga minyak angin dan sandal jepit. ● han

Orangtua Diminta Agar Mengantar Anak Remajanya Ikuti Vaksinasi Covid-19

JAKARTA (IM) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate meminta para orangtua agar mengantar anaknya yang berusia 12-17 tahun (remaja) saat mengikuti vaksinasi Covid-19.

Johnny mengatakan, hal itu penting dilakukan agar para remaja yang tengah mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terlindungi dari penularan Covid-19.

“Orangtua antarkan anaknya ke tempat vaksinasi terdekat. Meski ada berbagai jenis vaksin yang sudah beredar di Indonesia, pemerintah meminta masyarakat jangan pilih-pilih vaksin,” kata Johnny dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/12).

Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Jumat (3/12) lebih dari 20 juta remaja telah mendapatkan suntikan pertama vaksin Covid-19. Angka itu setara dengan presentase 76,85 persen dari target vaksinasi Covid-19 yang ditetapkan pemerintah untuk anak usia 12-17 tahun. Kemudian sebanyak 14,8 juta atau sekitar 55,5 persen

remaja sudah mendapatkan suntikan kedua.

Pemerintah menargetkan total 26.705.490 remaja mesti divaksinasi Covid-19 dalam dua kali suntikan.

“Meski sudah melampaui angka 75 persen pemerintah terus menggenjot vaksinasi kelompok remaja untuk melindungi remaja Indonesia dari ancaman virus Covid-19,” katanya.

Menurut Johnny, capian vaksinasi ini harus diimbangi dengan kekompatan anak dan orangtua dalam penerapan protokol kesehatan.

“Para remaja dan orangtua harus saling mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

Sebagai informasi, berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, Sabtu (4/12) jumlah remaja yang telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 bertambah. Saat ini sebanyak 20.485.485 atau 76,71 persen anak usia 12-17 tahun telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama.

Sementara itu, sebanyak 14.934.995 atau 55,92 persen remaja telah menerima dua kali suntikan vaksinasi Covid-19. ● mar

2 Polhukam

FOTO/ANT



MENSOS MENINJAU DAPUR UMUM KORBAN GUNUNG SEMERU

Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) meninjau dapur umum korban letusan Gunung Semeru di Desa Sumberwuluh, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Minggu (5/12). Dalam kunjungannya Mensos memantau kebutuhan yang dibutuhkan dan meminta warga yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Gunung Semeru untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman saat hujan deras.

Saldi Isra Hakim MK Pilihan Presiden yang Lebih Memilih Koreksi UU Cipta Kerja

Saldi Isra mengakui bahwa hakim MK paling rawan dalam menjaga independensi dari sisi hakim dan institusi. Sebab itu hakim MK haruslah seorang negarawan.

JAKARTA (IM) - Saldi Isra mengaku menjadi hakim konstitusi dari unsur Presiden dan dipilih lewat pansel yang dipilih presiden. Namun soal UU Cipta Kerja (Ciptaker), Saldi lebih memilih berseberangan dengan Presiden. Ia menyatakan UU Ciptaker cacat formil sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Saldi pun mengungkap soal tantangan dalam menjaga independensi hakim, yang menurutnya Independensi kekuasaan kehakiman ditentukan 3 hal, yakni: Seberapa independensi hakimnya, seberapa independensi institusinya, dan seberapa independen anggarannya.

Menurut Saldi, hakim MK paling rawan dalam menjaga independensi dari sisi hakim dan institusi.

“Dalam soal satu dan dua, hakim konstitusi memang berat ya, dibandingkan yang lain,” kata “kata Saldi dalam seminar yang diarsikan di channel YouTube MK, Minggu (5/12).

Meski berat, Saldi kemudian menyebut syarat hakim MK di UUD 1945 adalah seorang negarawan. Syarat ini tidak ada definisinya dan hanya satu-satunya syarat pejabat publik yang harus dimiliki hakim konstitusi.

“Kalau dibaca jabatan publik yang ada di Indonesia ini, syarat negarawan hanya hakim

konstitusi. Yang lain nggak ada,” tutur guru besar Universitas Andalas, Padang, itu.

Syarat itu dapat dilihat dari catatan si hakim sebelum terpilih dan sesudah dipilih.

“Bagaimana caranya? Prof Aswanto menyatakan kami hakim konstitusi 9 orang. Tiga orang diajukan Mahkamah Agung, 3 orang diajukan DPR. Begitu kami masuk di dalam, kami di dalam tidak ada lagi cerita kami wakil DPR, harus memperjuangkan kepentingan DPR. Nggak,” kata Saldi tegas.

Aswanto yang dimaksud adalah hakim MK dari unsur DPR yang dipilih untuk periode kedua sejak 21 Maret 2019. Aswanto sehari-hari adalah guru besar hukum pidana Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Meski demikian, dalam judicial review UU Cipta Kerja, Aswanto termasuk hakim konstitusi yang menilai UU Ciptaker cacat.

“Kalau kayak kemarin, Prof Aswanto, kan yang bikin UU kemarin kan DPR dengan Presiden. Harusnya membela mati-matian, tapi nggak,” kata Saldi.

Lalu, bagaimana dengan Saldi Isra sendiri? “Saya hakim konstitusi yang diajukan oleh Presiden. Karena salah satu pembentuk UU itu Presiden, seharusnya kan saya katakan ‘Oh nggak bisa, ini UU sudah bagus’. Tapi karena kita menilainya dengan konstitusi, di situlah ujian sesungguhnya hakim MK,” beber Saldi.

Berikut komposisi 9 hakim konstitusi dalam memutus UU Ciptaker:

5 Hakim MK menilai UU Ciptaker cacat formil: Aswanto (wakil Ketua MK) yang dipilih DPR Saldi Isra yang dipilih Presiden, Wahiduddins Adams dipilih DPR, Suhartoyo dipilih MA, dan Enny Nurbaningih yang dipilih Presiden.

Sementara 4 Hakim MK yang menilai UU Ciptaker tidak cacat formil, yakni Anwar Usman (Ketua MK) yang dipilih MA, Arief Hidayat dipilih DPR, Manahan Sitompul dipilih MA, Daniel dipilih Presiden.

Berdasarkan suara mayoritas hakim konstitusi di atas, akhirnya MK menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil dan harus diperbaiki.

“Saya katakan UU ini cacat formal. Ada 4 di dalamnya kami sebut cacat formilnya. Dia dibentuk tidak berdasarkan UU Pembentukan Peraturan Perundangan, tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundangan, tidak melibatkan partisipasi publik yang luas, kemudian ada yang sudah ditetapkan bersama diubah-ubah atau diganti ganti normanya. Satu saja ditemukan, maka cacat formal,” beber Saldi. ● han

Mahasiswi Unsri Ngaku Ditanya Dosen Warna Dalam hingga Ukuran Bra

PALEMBANG (IM) - Mahasiswi Universitas Sriwijaya (Unsri) yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual oleh dosen berinisial R bertambah. Mahasiswi berinisial D mengaku dilecehkan dosen R dengan kata-kata yang tidak pantas melalui aplikasi perpesanan.

Hal itu diungkap D usai memberikan keterangan di Subdit PPA Ditreskrim Polda Sumsel, Sabtu (4/11) kemarin. D baru berani buka suara usai dua kakak tingkatnya, C dan F, sudah melapor terlebih dahulu.

“Karena apabila kasus ini tidak diangkat, saya yakin bisa membuat dia (R) semakin menjadi-jadi. Dia tidak akan jera, bakal terus berlanjut. Bahkan juga bisa menimbulkan ketakutan untuk diri kita sendiri, juga sebagai mahasiswa,” kata D di Mapolda Sumsel.

D mengaku mendapat pelecehan dari sang dosen melalui aplikasi Telegram. Sementara itu, dua korban lainnya dilecehkan R via WhatsApp.

“Saya sendiri mengalami pelecehan dari Telegram,” kata D.

D kemudian menjelaskan pelecehan seperti apa yang ia alami. Kejadian itu, menurutnya, bermula ketika ia menghubungi R. R saat itu merupakan dosen pengujinya dalam ujian kompre.

“Awalnya saya menghubungi dia, dengan tujuan untuk mengurus keperluan administrasi sebelum menghadapi ujian. Tapi, komunikasi itu berlanjut, dia menghubungi telegram saya pada 14 Juli 2021 lalu,” katanya.

D mengaku tidak habis pikir isi percakapan dosen R

terhadapnya tiba-tiba mengarah ke arah pelecehan seksual. Dosen R, kata D, sempat meminta nomor rekeningnya untuk memberikan uang jajan. Permintaan R itu pun lantas tidak digubrisnya.

“Awalnya dia (R) nanyanya biasa, tapi ujungnya nge-chat minta nomor rekening. Saya tanya untuk apa, terus dia jawab katanya mau kasih uang jajan. Langsung saja saya tolak, karena saya pikir untuk apa kok dia mau kasih uang. Makanya tidak saya balas,” ungkap D.

Risi yang dialami D tidak sampai di situ. Malam harinya, menurut D, dosen R kembali mengirimkan chat yang berisi kata-kata yang menurutnya sangat tidak pantas dilakukan seorang dosen terhadap anak didiknya.

D, yang hanya mengabaikan pesan tak senonoh itu, semakin resah karena, menurutnya, dosen R seperti tidak pantang menyerah dan terus berusaha menghubungi D. Pada akhirnya oknum dosen itu mengirimi pertanyaan yang menurut D sangat tidak pantas.

D dengan sengaja tidak melaporkan kejadian yang dialaminya itu ke pihak Unsri karena tidak mau masalahnya hanya berakhir di jalur mediasi. Oleh karena itu, D lebih memilih langsung membuat laporan ke polisi.

“Karena saya berkaca dengan kasus sebelumnya. Perlakuan tidak nyaman diterima oleh mereka berdua (korban sebelumnya C dan F). Memang sengaja saya tidak memberitahukan fakultas karena tidak mau ditawari mediasi dan semacamnya. Saya mau langsung ke polisi saja karena memang tujuan saya untuk melaporkan dosen R. Saya tidak mau melibatkan kampus,” jelas D.

Sebelumnya, Polisi kembali menerima pengakuan seorang mahasiswi Universitas Sriwijaya (Unsri) yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual oleh dosen berinisial R bertambah. Mahasiswi itu berinisial D. Dia memberanikan diri melapor ke polisi setelah dua rekannya lebih dulu melapor. ● mei



KONVOI KENDARAAN PERINGATI HARI RELAWAN INTERNASIONAL. Sejumlah kendaraan operasional relawan gabungan mengikuti konvoi keliling kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu (5/12). Aksi konvoi kendaraan operasional dan ambulance tersebut merupakan rangkaian acara dari peringatan Hari Relawan Internasional.

TNI AU Kerahkan Paskhas hingga Pesawat Hercules Bantu Penanganan Erupsi Semeru

JAKARTA (IM) - TNI Angkatan Udara (TNI AU) mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk membantu tanggap darurat bencana erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur. Puluhan prajurit dan pesawat TNI AU telah diterjunkan untuk mendukung penanganan bencana tersebut.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsma TNI Indan Gilang Buldanyah, menjelaskan, sebanyak 46 prajurit Lanud Abdulrachman Saleh, diturunkan ke lokasi bencana di Lumajang, Jawa Timur, Minggu (5/12).

Sebelumnya, kata dia, TNI AU sudah mengirimkan puluhan prajurit yang terdiri dari

unsur Paskhas untuk SAR, Kesehatan, Potdirga, Intel dan penerangan ke lokasi bencana.

“Misi prajurit TNI AU yang dipimpin Kadispotdirga Lanud Abdulrachman Saleh adalah menyerahkan bantuan Sembako ke posko utama yang ada di pendopo Bupati Lumajang dan lanjut mendirikan tenda posko tanggap darurat di desa terdampak Sumber Wuluh, Lumajang,” kata Indan Gilang dalam keterangannya, Minggu (5/12).

Kadispenau menambahkan, pergerakan prajurit di darat juga didukung kendaraan truk logistik dan peralatan SAR, Ambulance kesehatan dan motor kawal. Saat ini, kata

dia, beberapa Alusista TNI AU juga sudah bergerak ke Lanud Abdulrachman Saleh Malang.

“Satu pesawat helikopter EC-120 Colibri yang langsung dipimpin Komandan Lanud Abdulrachman Saleh Malang Marsma TNI Zulfahmi melaksanakan assesment peman-taan lokasi terdampak erupsi dari udara,” ujarnya.

Sementara, satu Helikopter AS-332 Super Puma bergerak dari Lanud Iswahjudi menuju Lanud Abdulrachman Saleh, Malang. “Selain itu juga disiagakan helikopter di Lanud Atang Sendjaja Bogor dan satu pesawat C-130 Hercules di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta,” katanya. ● mei

PENGUMUMAN
RENCANA PEMBAGIAN KEKAYAAN HASIL LIKUIDASI
PT SMART BELI COMMERCINDO (DALAM LIKUIDASI)

Guna memenuhi ketentuan Pasal 149 (ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUPT), Likuidator PT SMART BELI COMMERCINDO (DALAM LIKUIDASI), berkedudukan di Jakarta Utara (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini mengumumkan rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi Perseroan adalah sebagai berikut:

a. bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelaahan Likuidator, Perseroan saat ini tidak memiliki sisa utang tertunggak kepada kreditur mana pun yang belum terselesaikan;
b. bahwa saat ini Perseroan memiliki sisa kekayaan dengan total Rp. 265.786.598,48;
c. bahwa terhadap total sisa kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) di atas, akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan secara proporsional dengan kepemilikan saham atau modalnya dalam Perseroan, yakni dengan pembagian sebagai berikut:

i. sebesar Rp.212.629.278,78 akan dibagikan kepada Tuan Xu Longhua selaku pemilik dan pemegang 80% (delapan puluh persen) saham dalam Perseroan; dan
ii. sebesar Rp.53.157.319,70 akan dibagikan kepada Tuan Liao Jiyin selaku pemilik dan pemegang 20% (dua puluh persen) saham dalam Perseroan.

Sesuai dengan Pasal 149 ayat (3) UUPT, bagi kreditur dan pihak-pihak yang keberterangan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi Perseroan sebagaimana tersebut di atas dapat mengirimkan surat keberatan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada Likuidator Perseroan dengan alamat:

Tn. Xu Longhua
Liberty Tower Unit Code OTB 2WF, Pantai Indah Kapuk
Jakarta Utara, 14470

Jakarta, 2 Desember 2021
Likuidator
PT Smart Beli Commercindo (Dalam Likuidasi)

PENGUMUMAN

Berdasarkan RUPS Luar Biasa PT. NUSABUANA KIMINDO, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) tanggal 4 Nopember 2021, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan antara lain tetapi tidak terbatas pada sebagai berikut :

menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp. 500.000.000,- menjadi Rp 120.500.000.000,- yang penyetoran sahamnya dilakukan dengan cara menerbitkan sebanyak 24.000 saham seri B dalam Perseroan yang seluruhnya diambil bagian dan disetor dengan cara mengkonversi hutang Perseroan kepada :

a. FUTURE FAST SECURITIES LIMITED, sebanyak 12.000 (dua belas ribu) saham seri B.
b. CONCHUBAR CHEMICALS LTD, sebanyak 12.000 (dua belas ribu) saham seri B.

Satu dan lain untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tanggal 25 Februari 1999 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 6 Desember 2021
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT FLINT GROUP INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bekasi (“Perseroan”) yang ditandatangani pada tanggal 02 Desember 2021, telah disetujui oleh para pemegang saham: Peningkatan Modal Dasar Perseroan dan Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor Perseroan dengan cara konversi pinjaman menjadi saham.

Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikomposisikan Sebagai Setoran Saham.

Kabupaten Bekasi, 06 Desember 2021
Direksi Perseroan